



Judul : RUU Kepariwisata, ciptakan era baru wisata berkualitas
Tanggal : Minggu, 14 September 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

RUU Kepariwisata

Ciptakan Era Baru Wisata Berkualitas

RANCANGAN Undang-Undang (RUU) Kepariwisata selesai dibahas. Komisi VII DPR bersama Pemerintah telah menyetujui pengambilan keputusan tingkat I, dengan seluruh fraksi menyatakan persetujuan. Selanjutnya, RUU ini akan dibawa ke pembicaraan tingkat II untuk disahkan menjadi undang-undang.

Anggota Komisi VII DPR Erna Sari Dewi menyebut, RUU ini membawa sejumlah pembaruan penting. Aturan baru tersebut mencakup pengelolaan warisan budaya, penguatan ekosistem pariwisata, pengembangan kawasan ekonomi khusus, peningkatan sumber daya manusia, hingga aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

"RUU ini memberi pijakan baru bagi pembangunan pariwisata yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan," ujar politikus Partai NasDem itu, Sabtu (13/9/2025).

Menurut Erna, pariwisata harus mampu menghadirkan keseimbangan antara keuntungan ekonomi, kelestarian alam, dan keadilan sosial. Inovasi berbasis teknologi juga dinilai penting agar Indonesia dapat bersaing di era global.

"Tata kelola pariwisata tidak boleh mengorbankan lingkungan atau mengabaikan peran masyarakat lokal. Prinsip keadilan harus dijaga agar manfaat pariwisata dirasakan seluruh lapisan masyarakat," tegasnya.

Wakil Ketua Komisi VII DPR

Chusnunia Chalim menambahkan, RUU ini diharapkan membawa Indonesia memasuki era baru pariwisata nasional. Menurutnya, arah pembangunan pariwisata ke depan tidak lagi mengejar kuantitas kunjungan, melainkan kualitas.

"Secara umum, RUU ini bertujuan mengubah paradigma dari mass tourism menjadi pariwisata berkualitas, melalui pembangunan ekosistem pariwisata yang berkelanjutan dan melibatkan masyarakat lokal," jelas legislator PKB itu.

Chusnunia menuturkan, substansi perubahan dalam RUU ini berfokus pada peningkatan berbasis hak asasi manusia, pembangunan perikanan, dan penguatan identitas bangsa. Salah satu pembaruan penting adalah hadirnya istilah baru seperti "ekosistem kepariwisataan" dan "warisan budaya." Definisi wisata, pariwisata, dan kepariwisataan juga diperbarui agar lebih holistik dan terintegrasi.

Ia juga menyoroti pentingnya digitalisasi dalam promosi pariwisata. Strategi promosi digital terbukti efektif menjangkau wisatawan global yang kini mengandalkan internet dan media sosial untuk merencanakan perjalanan.

"Promosi digital adalah cara terbaik untuk menjangkau wisatawan di platform yang paling sering mereka gunakan," kata wakil gubernur Lampung periode 2019–2023 itu. ■ **PYB**